



POLITEKNIK POS INDONESIA

JURNAL AKUNTANSI

TH X / 01/ Februari / 2018

ISSN 1979 - 8334

Pengaruh Sistem Penggajian terhadap Kinerja Karyawan pada PT. TASPEN (Persero) KCU Bandung

Toto Suwarsa SE., MM., Ak, Anita Retha Rizki

Analisis pengendalian persediaan bahan baku dengan metode EOQ (*Economic Order Quantity*) untuk menentukan jumlah *purchase order* (PO) pada PT. Bakrie Pipa Industri

Khairaningrum M.

Pengaruh aktivitas pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan (FRAUD) pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Barat

Indra Firmansyah

Pengaruh audit operasional terhadap kualitas pelayanan jasa pada PT. Pos Indonesia (PERSERO)

Jaka Maulana

Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi khusus (DAK) terhadap pengalokasian belanja modal pada pemerintah Kota Cimahi

Rima Sundari

Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kota Cimahi

Ade Pipit Fatmawati

Analisis Penerapan E-Filing dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Mengacu Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2009 Di KPP BOJONAGARA Bandung

Diana Maryana SE., M.Si.

Analisis Penerapan Pemotongan Perhitungan penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan atau bangunan Di YPBPI Tahun 2017

Toto Suwarsa SE., MM., Ak

Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Prodi Akuntansi Terhadap Persepsi Mahasiswa Prodi Akuntansi terhadap Propesi Akuntan Publik Studi Kasus Pada Mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Pos Indonesia Sebelum dan Sesudah Menempuh Kuliah Auditing

Riani Tanjung SE., M.Si., Ak., CA

Spesifikasi User Requirement E-Learning Bahasa Inggris Menggunakan Metode KANO

Dewi Selviani, Sari Armiati

Pengaruh Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Terhadap Pengendalian Internal Pada Pt. Dirgantara Indonesia (Persero)

Marismiati



Jurnal Akuntansi (Ak)	Tahun X	Nomor 01	Bandung, Februari 2018	ISSN 1979-8334
-----------------------	---------	----------	------------------------	----------------

JURNAL AKUNTANSI

TH X / 01 / Februari/ 2018

ISSN : 1979-8334

Setiap tahun terbit dua kali pada bulan Februari dan Agustus. Berisi hasil penelitian dan kajian analisis di bidang Akuntansi.

SUSUNAN PENGURUS JURNAL AKUNTANSI :

Pelindung

Dr. Ir. Agus Purnomo, MT.

Penanggung Jawab

Y. Casmadi , SE., MM

Indra Firmansyah, SE.,Ak.,MM

Penyunting

Diana Maryana, SE.,M.Si

Anggota

Surya Ramadhan Noor, SE., MM..

Toto Suwarsa, SE., Ak., MM.

Diana Maryana, SE.,M.Si

Tia Setiani, S.Pd.,MM

Dewi Selviani Y, SS. M.Pd.

Jaka Maulana, SE.,M.Ak.,Ak.,CA.,CPSAK

Khairaningrum Mulyanti, S.Pd., M.Pd.

Rima Sundari, SE., M.Ak., Ak.

Riani Tanjung, SE.,MSi.,Ak.,CA

Rukmi Juwita, SE., M.Si., Ak., CA.

Ade Pipit Fatmawati, SE., M.Pd

Marismiati, SE., M.Si

M. Rizal Satria, SE., M.Ak.,Ak

ALAMAT PENYUNTING DAN REDAKSI :

Jurusan Akuntansi, Gedung Pendidikan,

Politeknik Pos Indonesia

Jl. Sariasih No 54 Bandung 40151 Telp. 022-2009570, Fax 022-2009568,

E-mail : d3_akuntansi@poltekpos.ac.id

Prodi Akuntansi D III Politeknik Pos Indonesia, telah Terakreditasi B berdasarkan Keputusan Dirjen DIKTI No.1072/BAN-PT/Akred/Dpl-III/IX/2015

KATA PENGANTAR

Jurnal Akuntansi diterbitkan setiap enam bulan sekali oleh Jurusan Akuntansi Politeknik Pos Indonesia, dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat luas, yaitu bagi baik para akademisi, mahasiswa, praktisi dan pihak lainnya yang isinya berupa kajian ilmu dan hasil riset di bidang akuntansi.

Penerbitan saat ini terdiri dari 5 (lima) topik, meliputi :

Analisis Laporan Keuangan
Akuntansi Biaya
Perpajakan
Auditing
Manajemen Keuangan

Mudah-mudahan semua artikel yang dimuat dapat menambah pengetahuan dan pengalaman para pembaca, sehingga menambah semangat untuk terus berinovasi melahirkan karya tulis yang bermanfaat. Amin

Bandung, Februari 2018

Redaksi

DAFTAR ISI

SUSUNAN PENGURUS JURNAL AKUNTANSI	i
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
Pengaruh Sistem Penggajian Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Taspen (Persero) Kcu Bandung	1
Analisis Pengendalian Persediaan Bahan Baku Dengan Metode Eoq (<i>Economic Order Quantity</i>) Untuk Menentukan Jumlah <i>Purchase Order</i> (Po) Pada Pt. Bakrie Pipa Industri	12
Pengaruh Aktivitas Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pada Pt Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Bandung Barat.....	25
Pengaruh Audit Operasional Terhadap Kualitas Pelayanan Jasa Pada Pt Pos Indonesia (Persero).....	37
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Cimahi	511
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi.....	611
Analisis Penerapan <i>E-Filing</i> Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Mengacu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara Bandung.....	753
Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 4 Ayat 2 Atas Penghasilan Sewa Tanah Dan/Atau Bangunan	90
Analisis Perbedaan Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Politeknik Pos Indonesia Sebelum & Sesudah Menempuh Mata Kuliah Auditing Terhadap Profesi Akuntan Publik	999
Spesifikasi User Requirement E-Learning Bahasa Inggris Menggunakan Metode Kano	11313
Pengaruh Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Terhadap Pengendalian Internal Pada Pt. Dirgantara Indonesia (Persero)	11322

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS PENGHASILAN SEWA
TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
DI YPBPI TAHUN 2017**

Oleh : Toto Suwarsa, SE., Ak., MM.

ABSTRAK

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002. Menurut Ketentuan tersebut penghasilan berupa sewa tanah/dan atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto persewaan tanah/atau bangunan. Penelitian ini dilakukan pada YPBPI periode 2017. Ada beberapa data yang digunakan, diantaranya bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2, bukti penerimaan surat, SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 dan bukti setor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan di YPBPI telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 tentang pengenaan pajak atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Undang-Undang

PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban bagi wajib pajak badan adalah untuk memotong, menyetor dan melaporkan setiap pajak terutang termasuk PPh Final Pasal 4 ayat (2). Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan

dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002. Menurut

Ketentuan tersebut penghasilan berupa sewa tanah/dan atau bangunan dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebesar 10% baik atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi dari jumlah bruto persewaan tanah/atau bangunan,

Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) adalah suatu lembaga yang dalam kegiatan usahanya melakukan sewa bangunan kepada PT. Pos Indonesia, karena aktivitas sewa tersebut, maka YPBPI harus memotong, menyetor dan melaporkan setiap pajak terutang termasuk PPh Final Pasal 4 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 4 AYAT 2 ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI**

YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA (YPBPI) TAHUN 2017”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar YPBPI, aktivitas yang dilakukan mencakup penyelenggaraan jasa pendidikan, pelatihan, dan optimalisasi aset untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan.

1. Dalam penyelenggaraan jasa pendidikan saat ini dikelola oleh unit Poltekpos dan STIMLOG, dimana Poltekpos menyediakan program studi pendidikan untuk jenjang Diploma III dan IV, sedangkan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik (STIMLOG) Indonesia menyediakan program studi

khusus di bidang ilmu logistik untuk jenjang Strata-1/Sarjana.

2. Untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan menggunakan pola kerja sama dengan berbagai pihak terkait dengan mengoptimalkan peran bidang dukungan pendidikan bidang jasa akomodasi di *head office*/Yayasan dan PT Prima Yasa Eduka sebagai unit usaha YPBPI.
3. Dalam aktivitas dukungan pendidikan bidang jasa akomodasi dimaksudkan untuk memaksimalkan utilitas dari aset gedung dan sarana yang dikelola YPBPI untuk mendukung kegiatan pendidikan, sehingga *total productivity* YPBPI meningkat karena tidak semua aset yang ada saat ini dapat digunakan dan cocok untuk kegiatan pendidikan.

Analisis Data dan Pembahasan

Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2

Berikut ini adalah data pembayaran sewa bangunan yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) pada tahun 2017

Tabel 4.1

Data Sewa Bangunan

No	Bulan	Nilai Sewa
1	Maret	1.254.000.000
2	Mei	1.254.000.000
3	September	1.821.000.000
4	November	15.357.000

2. Bulan Maret

Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) membayar sewa gedung sebesar Rp. 1.254.000.000, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan adalah sebesar Rp. 1.254.000.000 sehingga Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 yang harus dipotong oleh Yayasan

Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) atas pembayaran sewa kepada pihak penyewa adalah sebesar:

- a. Menghitung Dasar Pengenaan Pajak Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan)
- b. Menghitung PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 Ayat

3. Bulan Mei

Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) membayar sewa gedung sebesar Rp. 1.254.000.000, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan adalah sebesar Rp. 1.254.000.000 sehingga Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 yang harus dipotong oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) atas pembayaran sewa kepada pihak penyewa adalah sebesar:

- a. Menghitung Dasar Pengenaan Pajak Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan)
- b. Menghitung PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 Ayat 2

Tabel 4.2
Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Bangunan Masa Pajak Mei

PPh Final	: Tarif 10% x DPP
	: 10% x Rp. 1.254.000.000
	: Rp. 125.400.000
Berdasarkan SPT Masa u/ Masa Pajak Mei	: Rp. 125.400.000
Selisih	: Rp. 0

Berdasarkan Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 masa pajak Mei, telah dipungut pajak penghasilan atas sewa bangunan sebesar Rp. 125.400.000, sedangkan pada perhitungan pada tabel 4.3 yakni sebesar Rp. 125.400.000, sehingga tidak terdapat selisih kurang/lebih bayar.

Tabel 4.3
Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas
Sewa Bangunan Masa Pajak Mei

PPh Final	: Tarif 10% x DPP
	: 10% x Rp. 1.254.000.000
	: Rp. 125.400.000
Berdasarkan SPT Masa u/ Masa Pajak Mei	: Rp. 125.400.000
Selisih	: Rp. 0

Berdasarkan Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 masa pajak Mei, telah dipungut pajak penghasilan atas sewa bangunan sebesar Rp. 125.400.000, sedangkan pada perhitungan pada tabel 4.3 yakni sebesar Rp. 125.400.000, sehingga tidak terdapat selisih kurang/lebih bayar.

4. Bulan September

Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) membayar sewa gedung sebesar Rp. 1.821.000.000, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan adalah sebesar Rp. 1.821.000.000 sehingga Pajak

Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 yang harus dipotong oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) atas pembayaran sewa kepada pihak penyewa adalah sebesar:

- a. Menghitung Dasar Pengenaan Pajak Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan)
- b. Menghitung PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 Ayat 2

Tabel 4.4
Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas
Sewa Bangunan Masa Pajak September

PPh Final	: Tarif 10% x DPP
	: 10% x Rp. 1.821.000.000
	: Rp. 182.100.000
Berdasarkan SPT Masa u/ Masa Pajak September	: Rp. 182.100.000
Selisih	: Rp. 0

Berdasarkan Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 masa pajak Maret, telah

dipungut pajak penghasilan atas sewa bangunan sebesar Rp. 182.100.000, sedangkan pada perhitungan pada tabel 4.4 yakni sebesar Rp. 182.100.000, sehingga tidak terdapat selisih kurang/lebih bayar.

5. Bulan November

Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) membayar sewa gedung sebesar Rp. 15.375.000, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan adalah sebesar Rp. 15.375.000 sehingga Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 yang harus dipotong oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) atas pembayaran sewa kepada pihak penyewa adalah sebesar:

- a. Menghitung Dasar Pengenaan Pajak Dasar Pengenaan Pajak (Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan)

- b. Menghitung PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 4 Ayat 2

Tabel 4.5
Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Bangunan Masa Pajak Maret

PPh Final	: Tarif 10% x DPP
	: 10% x Rp. 15.375.000
	: Rp. 1.537.500
Berdasarkan SPT Masa u/ Masa Pajak November	: Rp. 1.537.500
Selisih	: Rp. 0

Berdasarkan Formulir SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 masa pajak Maret, telah dipungut pajak penghasilan atas sewa bangunan sebesar Rp. 1.537.500, sedangkan pada perhitungan pada tabel 4.5 yakni sebesar Rp. 1.537.500, sehingga tidak terdapat selisih kurang/lebih bayar.

Analisis Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2

Setelah dilakukan perhitungan/pemotongan, maka tahap selanjutnya yaitu melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan. Adapun

batas waktu penyetoran yaitu tanggal 10 bulan berikutnya, dan untuk batas lapor untuk SPT Masa yaitu 20 hari setelah akhir masa pajak. Berikut data yang didapat oleh peneliti dari bukti setor PPh Pasal 4 Ayat 2 yang dilakukan oleh YPBPI:

Tabel 4.6
Waktu Penyetoran dan Pelaporan PPh
Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah
dan/atau Bangunan YPBPI

No	Periode	Tanggal Setor	Tanggal Lapor
1	Maret	10-Apr-17	17-Apr-17
2	Mei	08-Juni-17	9-Jun-17
3	September	09-Okt-17	12-Okt-17
4	November	-	-

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa proses penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Bangunan di YPBPI telah dilakukan setiap masa pajak yang telah ditentukan.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan atas perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan di YPBPI, untuk perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada masa pajak Maret terdapat kesalahan perhitungan/pemotongan pajak

yang seharusnya sebesar Rp. 126.550.000 dan dipotong sebesar Rp. 125.400.00, sehingga terjadi selisih kurang bayar sebesar Rp. 1.150.000 dan diharuskan untuk membayar kekurangan tersebut dan akan diketahui pada saat pelaporan SPT Tahunan.

Untuk perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan pada masa pajak Mei telah dipungut pajak penghasilan atas sewa bangunan sebesar Rp. 125.400.000 dan tidak terdapat selisih kurang/lebih bayar.

Untuk perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan pada masa pajak September telah dipungut pajak penghasilan atas sewa bangunan sebesar Rp. 182.100.000 dan tidak terdapat selisih kurang/lebih bayar.

Untuk perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan pada masa pajak Mei telah dipungut pajak penghasilan atas sewa bangunan sebesar

Rp. 1.537.500 dan tidak terdapat selisih kurang/lebih bayar.

Untuk proses penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan di YPBPI, telah dilakukan setiap masa pajak yang telah ditentukan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Penerapan Perhitungan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau bangunan di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI)”. Maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Untuk perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 sudah benar dan sesuai dengan peraturan perpajakan
2. Untuk proses penyeteroran dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat 2 Atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan di YPBPI, telah

dilakukan setiap masa pajak yang telah ditentukan

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran atau rekomendasi yang dapat peneliti berikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Diharapkan agar Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) selalu berperan aktif untuk mengetahui kebijakan-kebijakan perpajakan yang baru dibuat sehingga dapat diterapkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.
2. Diharapkan agar Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia (YPBPI) dapat terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan - Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1996 tentang pembayaran pajak penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.*

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1996 tentang pembayaran pajak*

penghasilan atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi.* Bandung: Alfabeta